

The Institute for Global Justice - Jakarta

# Cancun

Lembar Informasi KTM V WTO di Cancun, Mexico

# up- date

HARI I 09/09/2003

## Posisi-posisi Menjelang Cancun

*India, negara yang paling tegas bersuara di KTM Doha yang lalu, nampaknya akan kembali berperan lewat serangannya atas negara-negara kaya menjelang Cancun.*

Sebagaimana dikatakan Perdana Menteri India, Atal Bihari Vajpayee, "Kita semua secara sedih menyadari bahwa dimensi pembangunan dari Putaran Doha tidaklah mendapat perhatian yang selayaknya". Menurutnya India, ASEAN dan negara-negara berkembang lain akan melawan. "Kita berusaha untuk memperlihatkan adanya asimetri dan ketidakseimbangan dalam perjanjian perdagangan multilateral, tetapi terus disingkirkan ke dalam isu-isu non-trade related. Kita melihat bagaimana negosiasi agenda Doha berada dalam dua-jalur proses, akan tetapi kepentingan kita selalu ditempatkan di jalur lambat". India akan berjuang terutama bagi pemotongan subsidi pertanian negara-negara maju, demikian dikatakan Menteri Perdagangan dan Industri India, Arun Jaitley. Tidak akan ada kompromi bagi India bila kita berbicara tentang kepentingan 650 milyar petani India, katanya lagi. India juga akan ngotot memperjuangkan special and preferential treatment untuk negara-negara berkembang.

Di pihak Uni-Eropa, Komisioner Perdagangan Pascal Lamy menyatakan bahwa perundingan Cancun akan merupakan "tahap antara", di mana para negosiator akan melihat stok dan menentukan apakah putaran baru liberalisasi akan tercapai sesuai jadwal.

Uni-Eropa mengharapkan Cancun berhasil guna menambah energi untuk penyelesaian perundingan Putaran Doha yang harus berakhir pada akhir tahun 2004.

Brazil akan mendorong penghapusan subsidi pertanian AS dan Uni-Eropa, demikian kata Menlu Celso Amorim. Brazil dan India telah bersama-sama menolak proposal pertanian AS- Uni Eropa di bulan Agustus lalu, karena akan merugikan kepentingan produsen petani di negara berkembang.

Negara-negara Afrika telah mengadakan pertemuan pra-Cancun. The Global Coalition for Africa menyelenggarakan pertemuan dua hari menjelang Cancun, yang dihadiri oleh para menteri perdagangan, parlemen, sektor swasta, perwakilan organisasi regional dan internasional, dan lain-lainnya. Fokus pembicaraan adalah mengenai kapasitas ekspor Afrika dan praktek fair-trade guna menolong Afrika dalam

pembangunannya, serta akses pasar ke negara-negara maju bagi negara-negara Afrika. Mereka merasa pesimis dengan pertemuan Cancun. Kata Thabo Mbeki, Presiden Afrika Selatan, sebaiknya negara-negara miskin mengkaitkan dirinya dengan kelompok-kelompok protes anti-globalisasi agar mendapat posisi yang baik dalam perdagangan internasional. Katanya, "Mereka (kelompok anti-globalisasi) mungkin saja akan bertingkah dalam cara yang kamu dan saya tidak sukai - memecahkan kaca di jalanan dan lain-lainnya - tetapi pesan-pesan yang mereka sampaikan bersesuaian dengan kita".

Kelompok yang baru adalah yang disebut G-20, yaitu Brazil, Cina, India dan 17 negara berkembang lainnya, akan segera bertemu menjelang KTM Cancun. Kelompok 20 negara ini akan "mengkoordinasikan posisi-posisi mereka dalam kaitannya dengan perundingan pertanian". Dalam hal ini Australia dan New Zealand terkait dengan posisi G-20. Pernyataan G-20 menyatakan bahwa kami "mempunyai kesamaan persepsi bahwa pertanian adalah ujung tombak dari agenda pembangunan Doha".

Meskipun Cina adalah anggota aliansi G-20, Cina telah bersepakat dengan Australia dalam meningkatkan kerjasama di bidang pertanian. Cina dan Australia akan menjamin kualitas pangan dan keamanan pangan serta mendorong perdagangan bilateral. Tahun ini, perdagangan Sino-Australia mencapai rekor \$ 7,2 milyar, naik 28% dari sebelumnya.

Di pihak Uni-Eropa, Komisioner Perdagangan Pascal Lamy menyatakan bahwa perundingan Cancun akan merupakan "tahap antara", di mana para negosiator akan melihat stok dan menentukan apakah putaran baru liberalisasi akan tercapai sesuai jadwal. Katanya, " ini adalah persetujuan besar - sekitar 20 isu-isu yang terpisah dan 146 negara harus menentukan bagaimana cara-cara mengatasinya. Pertanian, katanya akan merupakan "hot ticket item". Menurutnya, "Tujuan kami adalah sederhana: menemukan keseimbangan antara pembukaan pasar dengan pelestarian wilayah pedesaan yang layak, bukan hanya untuk Uni-Eropa, tetapi juga untuk seluruh dunia". Uni-Eropa mengharapkan Cancun berhasil guna menambah energi untuk penyelesaian perundingan Putaran Doha yang harus berakhir pada akhir tahun 2004.

Presiden AS, George Bush, memerintahkan agar mengunci kesepakatan hingga 2005. Bush mendesak para perunding di WTO agar menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang ada selama ini dalam pertemuan Cancun, guna menyelesaikan perjanjian perdagangan dunia yang baru dalam 16 bulan mendatang. Katanya, "Menyelesaikan negosiasi global sampai dengan deadline 2005 adalah penting, karena pembukaan pasar global merupakan jalan kesuksesan bagi negara-negara kaya dan miskin". Bush sejak berkuasa telah menjalankan kebijakan pembuatan bilateral dan free trade agreement, tetapi menurutnya keuntungan terbesar adalah tetap pada "diselesaikannya negosiasi global WTO".

(WTO Newsbrief 5 September 2003 wto\_forum@hotmail.com) \*BS

## 40 Negara Berkembang Menolak “Isu Singapura”

*Dalam dokumen resmi yang dikirim ke sekretariat WTO, mayoritas negara-negara berkembang menginginkan isu-isu Singapura tetap diteruskan dalam kelompok kerja (working group) dan tidak diletakkan sebagai bagian dari negosiasi.*

Dokumen ini merupakan respon atas draft ministerial meeting kedua yang beredar 24 Agustus lalu. Dalam draft kedua tersebut, ketua general council memberikan dua pilihan berkaitan dengan isu Singapura. Pilihan pertama adalah memulai negosiasi segera setelah Cancun usai dan pilihan kedua adalah meneruskan klarifikasi isu Singapura dalam WTO.

Dalam lampiran, disebutkan apabila pilihan pertama yang dipilih telah dicantumkan bagaimana negosiasi itu dimulai dan dilakukan. Lampiran atas empat isu yang terdiri atas empat lampiran (masing-masing satu) tersebut sangat kontroversial karena merupakan cerminan kepentingan EU (Uni Eropa) dan Jepang dalam penyusunan modalitas. Jika negara-negara anggota WTO menerimanya maka itu menjadi mandat untuk melakukan negosiasi dan kemudian akan menjadi perjanjian baru.

Mayoritas negara-negara berkembang yang memilih opsi kedua (menolak negosiasi isu Singapura) mengkritik keras dokumen tersebut yang disebutnya sebagai tidak menyediakan ‘tempat’ untuk opsi kedua, yaitu klarifikasi isu.

Dalam lampiran dokumen, yang akan dimintakan sebagai formal dokumen dan disebarkan ke semua anggota WTO, dijelaskan beberapa klarifikasi isu Singapura dalam kelompok kerja.

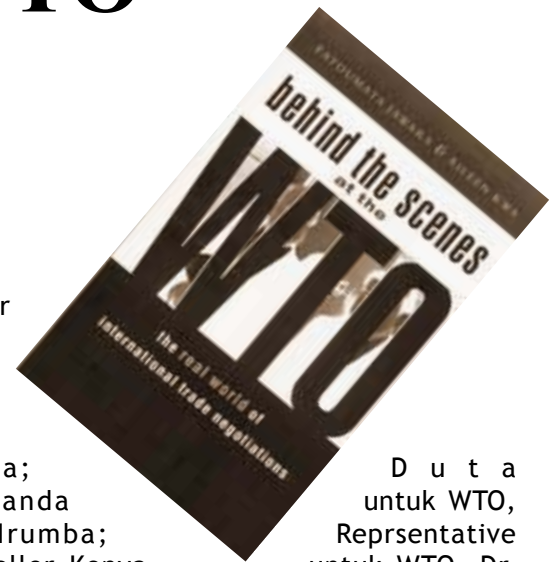
Berikut adalah beberapa klarifikasi dalam Working Group Isu Singapura yang disebutkan dalam dokumen tersebut:

- Perlu klarifikasi lebih jauh lagi mengenai hubungan isu Singapura dengan kerangka perjanjian multilateral lainnya perjanjian bilateral, dan perjanjian regional lainnya
- Berkaitan dengan isu hubungan antara perdagangan dengan investasi, masih diperlukan kejelasan mengenai pengecualian dan pengamanan neraca pembayaran, termasuk diantaranya hak negara anggota untuk meregulasi dan menerapkan kebijakan ketat untuk mengendalikan transfer dan perpindahan dana oleh investor asing dari dan ke *host country*. Masih perlu kejelasan untuk mengikat investor, terutama kewajiban untuk transfer teknologi, kendali kepemilikan, perlindungan konsumen dan perlindungan lingkungan.
- Berkaitan dengan klarifikasi isu perdagangan dan isu kompetisi. Klarifikasi prinsip non diskriminasi, terutama karena prinsip perlakuan nasional akan berimplikasi pada kepentingan negara berkembang dalam pembangunan, pengembangan industri dan kepentingan sosial.
- Berkaitan dengan transparansi dalam belanja pemerintah. Dokumen tersebut menyebutkan bahwa kelompok kerja hanya mencakup transparansi atau keterbukaan dalam belanja pemerintah, bukan akses pasar.

Dokumen (lihat [www.wto.org](http://www.wto.org)) bernomor WT/MIN (03)/W/4 dikeluarkan tanggal 4 September, oleh Banglades (atas nama group negara miskin/LDCs), Boswana, China, Cuba, Mesir, India, Indonesia, Kenya, Malaysia, Nigeria, Filipina, Tanzania, Uganda, Venezuela, Zambia dan Zimbabwe. (Hanim)

Terbit :

# BUKU TENTANG KECURANGAN- KECURANGAN WTO



Duta Besar  
Tanzania  
untuk  
WTO,  
Charles

Mutalemwa;  
Besra Uganda  
Nathan Irumba;  
dan Counsellor Kenya

dan Duta Besar  
mantan Duta Besar  
Republik Dominika untuk WTO, Dr. Federico Cuello; kesemuanya memberikan kesaksian saat buku berjudul “Behind the Scenes at the WTO: The Real World of International Trade Negotiations” yang ditulis oleh Fatoumata Jawara dan Aileen Kwa, diluncurkan menjelang KTM V Cancun di Jenewa, pada 3 september 2003 lalu. Kesaksian para Dubes negara-negara berkembang dan miskin itu menjelaskan terjadinya politik kekuasaan yang brutal telah terjadi di WTO, termasuk tekanan dan pemaksaan. Demikian pula diungkap adanya peran Sekretariat WTO yang tidak transparan, serba rahasia, dan adanya konsultasi kelompok-kelompok kecil yang bersifat manipulatif, serta berpihak kepada kepentingan AS dan Uni-Eropa. Praktek semacam ini sebenarnya sudah mulai terjadi sejak Tokyo Round (dibawah Dirjen GATT Olivier Long), dan mulai diformalkan oleh Dirjen GATT Arthur Dunkel lewat mekanisme “Green-Room” (yaitu ruang konferensi Dirjen yang wall-paper-nya berwarna hijau).

Duta  
untuk WTO,  
Representative  
untuk WTO, Dr.

bersambung ke hal 3

## Negara Berkembang Persoalkan Adanya Ketidakseimbangan Perdagangan

Perdana Menteri India, Atal Bihari Vajpayee, menyuarkan ketidakseimbangan dalam agenda perdagangan dan sekaligus menyerukan kepada negara-negara berkembang lainnya untuk melawan kondisi ini.

“Kita semua melihat bahwa dimensi pembangunan dalam putaran Doha tidak diberikan perhatian yang cukup” demikian katanya dalam pertemuan bisnis dua hari antara pengusaha India dan ASEAN. “Agenda Doha menurutnya ternyata terdiri dari dua jalan, dimana jalan yang menjadi kepedulian negara-negara berkembang selalu berjalan lambat.” Vajpayee juga menginginkan bahwa sistem perdagangan multilateral harus melibatkan dan memperhatikan kesejahteraan dan kehidupan ratusan juta penduduk yang tinggal di negera berkembang.

Isu transfer teknologi uang menjadi kepentingan negara berkembang juga harus diperhatikan.

Berkaitan dengan Isu Singapura yang terdiri dari fasilitasi perdagangan, kompetisi, pembelanjaan pemerintah dan investasi, Vajpayee menegaskan bahwa India akan menolak isu-isu tersebut diletakkan sebagai bagian dari negosiasi. Demikian juga dengan Presiden Filipina Gloria Macapagal Arroyo dan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra. Presiden Filipina dalam kesempatan berpidato di Brunei mengatakan bahwa keberhasilan dari perundingan di WTO adalah ketika organisasi tersebut memenuhi janjinya untuk membuka akses pasar bagi produk negara-negara berkembang. Sedangkan Thaksin dalam pidatonya di depan bisnis forum menginginkan adanya perdagangan yang lebih seimbang antara negara berkembang dan negara maju. Sementara di tempat berbeda, Amerika Serikat mengancam akan mendorong agendanya sendiri apabila perundingan di WTO gagal. Hal tersebut dikatakan oleh Robert Zoellick (USTR) dalam diskusi melalui satelit dengan Pascal Lamy (Komisi perdagangan Uni Eropa).

Dalam ‘pertemuan’ tersebut, Zoellick dan Lamy sepakat untuk menekankan beberapa isu penting dalam pertemuan Cancun yang akan dimulai Rabu, 10 September besok. Isu-isu tersebut adalah: mengembangkan kerangka untuk negosiasi dalam pertanian, barang dan jasa tanpa meletakkan angka yang pasti dalam subsidi dan pemotongan tariff; memutuskan untuk mendiskusikan isu baru seperti investasi, transparansi dalam belanja pemerintah dan kompetisi, provisi perlakuan khusus dan berbeda untuk negara-negara berkembang. Sumber: Asia Times Online (9 September 2003); AFP (5 September 2003); AP Manila. (Hanim)

*sambungan dari hal 2*

Para Dubes Afrika menceritakan bagaimana mereka merasa tak berdaya ketika berjuang matian-matian di forum Jenewa sesuai dengan kepentingan negara mereka masing-masing, tetapi kemudian para negara besar bicara langsung ke ibukota negara masing-masing. Negara-negara besar itu menyatakan ketidaksenangan mereka atas ulah para Dubes tersebut, dan mengancam akan menghentikan kuota dan bantuan dana. Contohnya, dalam perundingan TRIPs dan Kesehatan Publik, Dubes Kenya mendapat tekanan langsung dari AS ke Menteriya untuk mengubah posisi mereka tentang isu tersebut. Contoh lain, Dubes Republik Dominika bahkan kemudian dicopot dari jabatannya, karena mempertahankan posisi mengenai penentangan atas Singapore issues, GATS dan kebersamaan dalam Like-Minded-Groups (LMG). AS yang tidak senang dengan sikap Dubes tersebut, kemudian menyatakan ketidaksenangannya langsung ke pemerintah Republik Dominika, sehingga akhirnya ia dicopot dari jabatannya.

Contoh kecurangan-kecurangan lain yang dicatat adalah:

- Perundingan WTO bersuasana kekhawatiran/ketakutan, dan sekretariat selalu berulang kali berpihak kepada negara-negara kaya. Sekretariat juga melakukan disinformasi kepada negara-negara berkembang
- AS dan Uni-Eropa secara sistematis selalu menjanjikan perdagangan bebas dan akses pasar guna menyuap negara-negara berkembang dan memecah aliansi di antara mereka.
- Negara besar menyuap negara-negara berkembang, misalnya AS memberikan bantaun \$ 600 juta dan peringanan utang \$ 500 juta kepada Pakistan; Tanzania ditekan dengan janji akan menerima peringanan utang sebesar \$ 3 milyar; dan lain-lainnya.
- AS mempunyai ‘black-list’ negara-negara yang suka membandel.

Seperti kata mantan Dubes republik Dominika, Federico Cuello, “negara-negara berkembang di WTO tidak bisa bebas berbicara atau berkumpul. Negara-negara bisa dihukum bila menyampaikan pandangan mereka atau membangun aliansi dengan negara lain yang sepaham ...Mereka tidak bebas mempromosikan kepentingan nasional mereka. Isu-isu mereka diabaikan, kecuali bila dipresentasikan secara kelompok dan bila kelompok ini menjadi efektif, maka Dubes-nya akan disingkirkan dari posisinya. ... Ketimbang berpihak kepada pihak yang lemah, aturan-aturan WTO malahan mengekalkan distorsi yang dilakukan si kuat”.

(SUNS, no. 5412, 5 September 2003) (BS)